



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKMAL ABBAS, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	90%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	99%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	90%
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kerugian Negara	Melalui Jalur Pidana	
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	85%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.881.306.000.-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp, 10.818.580.000.-
	Jumlah	Rp. 12.699.886.000.-

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
RIAU,

(AKMAL ABBAS, S.H., M.H)

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TABRONI, S.H**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,**

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

(TABRONI, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Realisasi anggaran ----- x 100 Jumlah pagu anggaran	97%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	96%
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan	Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Prasarana Sesuai Kebutuhan	----- x 100 Jumlah sarana dan prasarana	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi	98%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 48.158.000.-
2.	Layanan Perkantoran	Rp. 10.560.422.000.-
	Jumlah	Rp. 10,608,580,000.-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(TABRONI, S.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JACKSON APRIYANTO PANDIANGAN, S.H.,MH**
Jabatan : **KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(JACKSON APRIYANTO PANDIANGAN, S.H.,MH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	95 %
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100	95 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Penyuluhan dan Penerangan Hukum	<p>Jumlah target penerima penerangan hukum</p> <p>2. Jumlah penerima penyuluhan hukum</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah target penerima penyuluhan hukum</p>	
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	<p>Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>-----x 100</p> <p>Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan</p> <p>Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>-----x 100</p> <p>Surat perintah PAKEM yang diterbitkan</p>	<p>93 %</p> <p>95 %</p>

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pencarian Buron Tindak Pidana / DPO	Rp. 30.000.000.-
2.	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000.-
2.	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 58.008.000.-
3.	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 20.000.000.-
4.	Lembaga yang telah diberikan Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 9.460.000.-
5.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.400.000.-
6.	Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/ Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 13.200.000.-
7.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 24.000.000.-
	Jumlah	Rp. 235.068.000.-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(JACKSON APRIYANTO PANDIANGAN, S.H.,MH)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **HAZA PUTRA, S.H**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BANGKINANG, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(HAZA PUTRA, S.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	90 %
2.	Meningkatnya Kualitas	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan	95 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
	Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	yang Diproses hingga Pra Penuntutan	$\frac{\text{hingga pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani}} \times 100$	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan}}{\text{Jumlah perkara yang ditangani}} \times 100$	95 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)}}{\text{Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)}} \times 100$	95 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 54.450.000.-
2.	Perkara pidana umum dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 753.830.000.-
3.	Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 40.000.000.-
4.	Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 12.352.000.-
Jumlah		Rp. 860.632.000.-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(HAZA PUTRA, S.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARTHALIUS, S.H., M,H**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAPTA PUTRA, S.H., M.H**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR**

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

(MARTHALIUS, S.H., M,H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan	90 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{100} \times$ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan	90 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan}}{100} \times$ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	95 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan}}{100} \times$ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	90 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)}}{100} \times$ Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang	90 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			rampasan)	
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p> $\frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap</p>	90 %
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{-----}} \times 100$ <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan</p>	90 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> $\frac{\text{-----}}{100} \times$ <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p>	90 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak)	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi</p>	90 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan TPPU yang telah Dieksekusi	(badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 206.000.000.-
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 141.728.000.-
3.	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 11.080.000.-
Jumlah		Rp. 358.808.000.-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(MARTHALIUS, S.H., M.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GINA OLIVIA, S.H., M.H**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 6 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(GINA OLIVIA, S.H., M.H)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	95 %
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang	95 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jalur Non Litigasi	berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	95 %
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100 Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	95 %
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan 3okum, pelayanan 3okum dan tindakan 3okum lain	95 %

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 30.000.000.-
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000.-
3.	Pertimbangan Hukum / Penampungan Hukum / Bantuan hokum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	Rp. 13.200.000.-
4.	Pertimbangan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 24.000.000.-
Jumlah		Rp. 74.400.000.-

D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(GINA OLIVIA, S.H., M.H)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAD HIDAYAT, S.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR

(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

(RAHMAD HIDAYAT, S.H)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	95 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p> Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset </p>	95 %

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya -----x 100 Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/ Sitaan/ Rampasan	Rp. 250.000.000.-
	Jumlah	Rp. 250,000,000.-

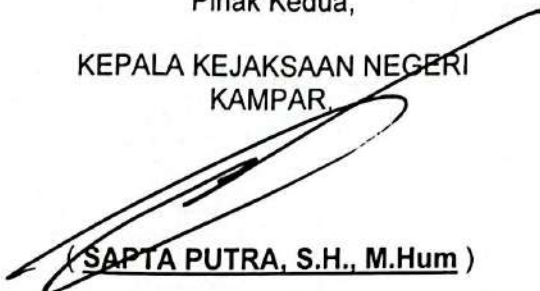
D. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)

Bangkinang, 06 Januari 2025,

Pihak Kedua,

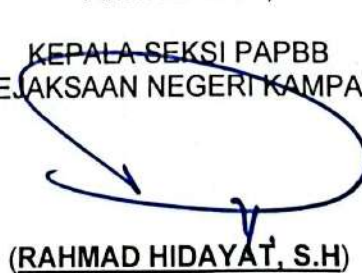
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KAMPAR,



(SAPTA PUTRA, S.H., M.Hum)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB
KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR



(RAHMAD HIDAYAT, S.H)